

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi untuk menjamin terwujudnya Keselamatan Konstruksi. Angka kecelakaan kerja pada proyek pembangunan konstruksi di Indonesia adalah paling tinggi diantara sektor perusahaan lainnya. Berdasarkan statistik, terlihat yaitu insiden pekerjaan pada sektor konstruksi terus bertambah dari periode 2012 sampai 2014. Mayoritas insiden kecelakaan pekerjaan berdasarkan dari pekerjaan konstruksi dan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan data penelitian, dari sekitar 332 data dikumpulkan, terdapat insiden pada persentase paling tinggi (47%) tercatat pada proyek gedung, kemudian diikuti oleh perumahan (42%) dan sektor lainnya (11%). (Ghuzdewan and Damanik 2019)

Dalam rentang tahun 2017 hingga 2018 telah banyak terjadi kecelakaan kerja di lokasi pembangunan infrastruktur nasional. Di antaranya, terlepasnya beton dari crane dan runtuhnya box girder pada proyek LRT Jakarta. Kemudian, runtuhnya Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) pada proyek Jalan Tol Bogor-Ciawi—Sukabumi). Sedangkan di awal 2018, tercatat dua kecelakaan pasca konstruksi, yaitu ambruknya selasar Gedung BEI (Jakarta) pada 15 Januari serta turap longsor di km 8+6/7 Underpass Jalan Perimeter Selatan Bandara Soekarno-Hatta. (Suminto 2018)

Kecelakaan konstruksi berbeda pada kecelakaan kerja yang berakibat hanya di kalangan pekerja, tetapi kecelakaan di tempat konstruksi terdapat 4 aspek tertentu yang akan merasakan dampaknya yakni *people, public, property* dan *environment*. Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi itu dengan menteri PUPR telah menerbitkan Permen PUPR No.10 Tahun 2021 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi.

Salah satu pekerjaan konstruksi di Sumatera Barat adalah pembangunan Gedung DPRD Kota Padang di kompleks perkantoran Balai Kota Aie Pacah Padang dengan pelaksana jasa konstruksi PT Nindya Karya Persero. Berdasarkan nilai HPS proyek Rp. 117.452.784.620,71 (Seratus tujuh belas miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua

puluh rupiah tujuh puluh satu sen) bersumber dari APBD Kota Padang. Pembangunannya akan dilakukan selama 750 hari kalender atau 25 bulan secara multiyears. Proyek konstruksi yang dilaksanakannya oleh kontraktor pelaksana PT Nindya Karya Persero tergolong berisiko besar karena menggunakan peralatan berupa pesawat angkat dan memperkerjakan 116 orang tenaga kerja.

Berdasarkan tinjauan lapangan yang telah dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 masih ditemukan potensi bahaya kecelakaan kerja sesuai dengan Undang - Undang No.2 Tahun 2017 pasal 59 ayat 3, tidak terpenuhinya standart K4 dalam tahap pekerjaan konstruksi kuda – kuda baja WF (*wide flange*). Beberapa pekerja konstruksi kuda – kuda baja WF (*wide flange*) tidak menggunakan alat pelindung diri SNI, tidak menggunakan sabuk pengaman saat pekerjaan pemasangan kuda – kuda baja WF (*wide flange*) yang berada pada ketinggian lantai 3.

Sebagai upaya untuk meminimalisir kendala – kendala yang timbul dan memaksimalkan pelaksanaan SMKK dalam kegiatan di PT. Nindya Karya Persero, perlu dilakukan penelitian tentang **“EFEKTIFITAS PENERAPAN SMKK PADA PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KOTA PADANG (BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PUPR NO. 10 TAHUN 2021)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SMKK pada pembangunan Gedung DPRD Kota Padang belum maksimal.
2. Pemahaman dan kepedulian pekerja pada penerapan SMKK dalam pekerjaan konstruksi masih kurang.

## **1.3 Batasan Masalah**

Permasalahan dari penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Obyek penelitian fokus pada penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
2. Menganalisa Elemen SMKK.

3. Penelitian ini melibatkan seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan konstruksi, yakni Site Engineer Manager, Site Operational Manager, Office Engineer, Site Administration Manager, Health Safety Environment, Inspector, Laboratory Technical dan Pekerja.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan masalah yang teridentifikasi dan pembatasan masalah, maka dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tingkat capaian penerapan SMKK semua elemen yang ada dalam cakupan keselamatan konstruksi pada pembangunan Gedung DPRD Kota Padang.
2. Faktor yang menjadi kendala dalam penerapan SMKK pada pembangunan Gedung DPRD Kota Padang.

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisa capaian penerapan SMKK pada pembangunan Gedung DPRD Kota Padang.
2. Menganalisa faktor-faktor dominan yang menjadi kendala penerapan SMKK pada pembangunan Gedung DPRD Kota Padang.

Hasil dari penelitian diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Sebagai masukan kepada manajemen keselamatan kerja Kontraktor dalam meningkatkan program Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK).
2. Bahan referensi untuk peneliti selanjutnya dibidang SMKK.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab berisi tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistem penulisan hasil penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan hukum tentang penerapan SMKK, sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK), risiko keselamatan konstruksi

(RKK), persyaratan dokumen risiko keselamatan konstruksi (RKK), biaya penerapan SMKK, kecelakaan kerja, SPSS statistik, uji validitas dan reliabilitas dengan SPSS, microsoft excel, skala likert, persentase jawaban responden dan penelitian terdahulu.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, Observasi Penelitian, analisa hasil dan bagan alir penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang analisa data, pembahasan yang diperoleh untuk mengetahui tingkat capaian penerapan SMKK, selain itu juga untuk mengetahui tingkat kelengkapan fasilitas di proyek konstruksi.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran